

DAMPAK EKOWISATA BAHARI DALAM PERSPEKTIF KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DAN KELESTARIAN LINGKUNGAN PESISIR

***) Komang Jaka Ferdian, **) Iqbal Aidar Idrus DM' ***) Simson Tondo**

***) Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya**

*****) Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta**

******) Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Halmahera**

Email: komangjkg@gmail.com

Abstract

The tourism sector is an important part of realizing the economic equality of the community, especially those in the Coastal areas that are highly dependent on marine resources directly. Tourism industrialization provides space for investors or capital owners to enter, thus leading to a view of capitalism that raises grabbing resources. Privatization and industrialization of tourism not only have an impact on people's lives but also affect the quality of the environment around tourism sites. Industrial tourism is only felt by a handful of people so that the need for tourism management is environmentally friendly and the welfare of the surrounding community. This article uses descriptive qualitative methods and uses literature studies from various sources. Explanation of the contents of this article finds that tourism industrialization has an impact on community conflict, socio-cultural changes and the formation of power relations. Indonesia can be a pilot from other countries in developing ecotourism. Indonesia is currently an area that has natural beauty that can be used as an ecotourism potential. For example, regions in Indonesia that should be used as ecotourism objects include Minahasa, West Sumatra and Lombok.

Keywords: Ecotourism, Tourism Industry, Marine Ecotourism.

Latar Belakang

Poros maritim dunia menjelaskan bahwa daerah kepulauan yang dikelilingi oleh lautan untuk menjadi alat atau jalan dalam hal pemerataan baik itu sektor konektivitas antar pulau, pengembangan industri serta fokus pada keamanan. Presiden terpilih Indonesia pada tahun 2014 Joko Widodo dalam konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asian Timur menegaskan bahwa Indonesia memiliki tekad untuk menjadi Poros Maritim Dunia. terdapat lima pilar dalam mewujudkan cita-cita Indonesia sebagai poros maritim dunia diantaranya yaitu *Pertama*, Pembangunan kembali budaya maritim. *Kedua*, komitmen menjaga dan mengelola sumber daya laut. *Ketiga* Komitmen mendorong pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim. *Keempat*, Diplomasi yang mengajak semua mitra Indonesia untuk bekerjasama pada bidang kelautan dan terakhir *Kelima*, berkewajiban membangun kekuatan pertahanan maritim. (Presidenri.go.id, 2015)

Bidang yang menjadi penunjang bagi terwujudnya Indonesia sebagai Poros maritim dunia salah satunya terletak pada bidang Pariwisata. Bidang pariwisata menjadi bagian penting untuk mewujudkan pemerataan ekonomi masyarakat, terutama yang berada di

Pesisir yang sangat tergantung pada sumber daya kelautan secara langsung. Potensi yang dimiliki oleh Indonesia sebagai daerah wisata Bahari dapat dikatakan cukup besar karena Indonesia merupakan negara Kepulauan yang memiliki garis pantai terpanjang di dunia mencapai 99.093 Km, hal tersebut dapat berubah karena pulau di Indonesia belum sepenuhnya teridentifikasi. (Antaraneews, 2015)

Panjangnya garis pantai Indonesia menjadi kelebihan tersendiri dalam bidang Pariwisata. Indonesia sebagai negara tropis memiliki keunggulan dari kekayaan alamnya yang berupa bentang pantai yang indah, keanekaragaman hayati lautnya, serta kearifan lokal masyarakat pesisir. Sebut saja pulau bali yang memiliki keindahan dari garis pantainya, dan hal tersebut dapat mengembangkan perekonomian masyarakatnya. Merujuk pada Penelitian (Santi, 2017) menjelaskan bahwa Pariwisata di Nusa Penida memiliki pengaruh besar bagi kesejahteraan masyarakat. Pendapatan masyarakat Pulau Nusa Penida merujuk pada sektor wisata bahari rata-rata mencapai 36% hal tersebut menandakan bahwa kegiatan wisata Bahari di Pulau Nusa Penida memberikan kontribusi positif terhadap kesejahteraan masyarakat di sekitarnya.

Keindahan pariwisata di Nusa Penida berbanding terbalik dengan daerah lain yang memiliki keindahan alam di pesisir pantai namun tidak mendapatkan dampak ekonomis akibat adanya industrialisasi pariwisata. Industrialisasi pariwisata memunculkan pemisahan kelas antara pemilik modal dan masyarakat yang tinggal di pesisir tempat pariwisata berada. Pandangan pemilik modal lebih pada aspek keuntungan ekonomi, sehingga terkadang mengabaikan keberadaan masyarakat sekitar untuk diberdayakan. Sementara itu, masyarakat sekitar berpandangan bahwa terjaganya lingkungan garis pantai memberikan dampak positif dalam bidang ekonomi maupun sosial budaya masyarakat.

Industrialisasi pariwisata memberi ruang pada investor atau pemilik modal untuk masuk sehingga menyebabkan terjadinya pandangan kapitalisme yang menimbulkan *resources grabbing*¹. *Resources grabbing* memunculkan tindakan privatisasi pariwisata yang tentunya mengancam masyarakat lokal yang seharusnya diberdayakan untuk mengelola daerahnya

¹*Resources Grabbing* adalah istilah yang diambil untuk menjelaskan terkait pengambil alihan penguasaan dan kontrol atas kepemilikan, manfaat, dan akses sumber daya publik dari bersama dan dari negara menjadi penguasaan oleh korporasi dan perorangan. n tersebut otomatis masyarakat kehilangan sumber daya yang seharusnya dapat di kelola oleh masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

menjadi termarginalisasi. Sebut saja Labuan Bajo telah terjadi pencaplokan sumber daya publik yang berlangsung sangat masif sehingga menyingkirkan masyarakat lokal. Tercatat merujuk pada pemberitaan (Afioma, 2016) menjelaskan bahwa beberapa pulau dikuasai dan dibeli orang asing seperti pulau Bidadari, Kanawa dan Sebayur.

Privatisasi pulau tersebut menimbulkan pariwisata yang berbasis pada pemilik modal yang tidak memberikan kesempatan pada masyarakat. Perhitungan keuntungan merujuk pada (Afioma, 2016) menjelaskan bahwa sebagian besar penerimaan dari pariwisata di Labuan Bajo diterima oleh Operator wisata dan pengusaha kapal wisata sebesar 75,55%. Sebanyak 2,09% didapatkan oleh pengelola taman nasional dan pemerintah daerah. sebanyak 22,36% terdistribusi pada pengusaha hotel, restoran dan toko retail. Hal ini menurut pada pendapat (Dale, 2013) alih-alih membawa kesejahteraan, pembangunan sektor pariwisata adalah narasi tentang apa yang membuat rakyat miskin, bagaimana mereka menjadi tetap miskin dan mengapa mereka menjadi semakin miskin. Pengembangan pariwisata yang seharusnya mengakomodir untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan atas Undang-undang No. 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata

menjadi terbalik akibat adanya privatisasi pariwisata.

Privatisasi dan industrialisasi pariwisata bukan saja berdampak pada kehidupan masyarakat namun berdampak juga pada kualitas lingkungan sekitar tempat pariwisata. Merujuk pada Pemberitaan (Tempo, 2011) terjadi abrasi akibat adanya pembabatan hutan bakau, kerusakan terumbu karang, dan pembangunan di sempadan pantai. Kerusakan lingkungan tersebut akibat korporasi yang mengembangkan pariwisata tanpa melihat keadaan lingkungan hidup. Selain itu, buruknya lingkungan wisata diakibatkan oleh wisatawan yang datang dan merusak lingkungan secara aktif seperti membuang sampah tentunya dapat merusak ekosistem pesisir tempat wisata.

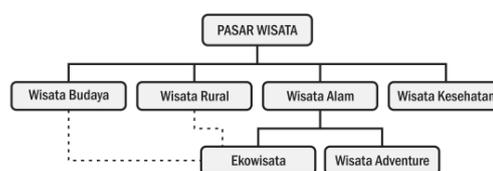
Atas dasar penjabaran diatas, penelitian ini ingin lebih jauh memetakan jenis wisata bahari yang menjaga lingkungan serta memberdayakan masyarakat. Demi meningkatnya kesejahteraan masyarakat serta terjaganya lingkungan perlu adanya kajian terkait ekowisata yang dalam penerapannya mementingkan aspek lingkungan, ekonomi dan sosial budaya bagi berembangnya masyarakat sekitar. Sehingga penelitian ini mengambil judul “Ekowisata Bahari dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

dan Menjaga Kelestarian Masyarakat Sekitar”.

Rumusan Masalah

Berdasarkan atas uraian latar belakang diatas, artikel ini lebih merujuk pada pertanyaan besar sebagai berikut:

- a. Apa dampak Investor Pariwisata dalam Pengelolaan Industrialisasi Pariwisata?
- b. Apa Potensi Ekowisata di Indonesia yang dapat dikembangkan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menjaga kelestarian lingkungan pesisir?
- c. Bagaimana dampak ekowisata bahari dalam perspektif kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan pesisir?



Diadaptasi dari publikasi WTO, dimodifikasi oleh Stradas, 2001 (dalam Wood:2002)

Kajian Teoritik

1. Ekowisata Bahari

Pariwisata berkelanjutan menjelaskan bahwa pariwisata harus memenuhi dua syarat utama yaitu dapat memenuhi kebutuhan masa sekarang dan masa mendatang serta tidak merusak alam dan budaya masyarakat setempat agar dapat diwariskan pada generasi penerus. Pariwisata berkelanjutan artinya

saat ini harus memiliki dua sikap yang perlu dijunjung ketika mengunjungi tempat wisata yaitu bertanggung jawab sehingga tidak mengakibatkan kerusakan alam dan budaya daerah yang dikunjungi serta perlunya sikap menghormati adat istiadat budaya penduduk daerah tempat wisata. Perwujudan pariwisata berkelanjutan saat ini lebih lanjut dikenal dengan istilah ekowisata.

Ekowisata merujuk pada (Mahadayani, 2009) dapat dipahami dalam dua tataran yaitu ekowisata dari segi konsep serta ekowisata pada segi pasar. Dari segi konsep Ekowisata mengutamakan pada pertanggung jawaban yang dilakukan di tempat-tempat alami, serta kontribusi terhadap kelestarian alam dan peningkatan kesejahteraan. Ekowisata merujuk pada Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia, merupakan konsep pengembangan pariwisata yang bertujuan mendukung kelestarian lingkungan dan meningkatkan partisipasi masyarakat untuk melakukan pengelolaan sehingga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat serta pemerintah setempat.

Ekowisata dari segi pasar mengacu pada bentuk kegiatan wisata yang mendukung pada pelestarian. Konsep “eko” saat ini menjadi trend dan populer bagi sebagian besar konsumen yang peduli terhadap lingkungan. Wisata yang

mengacu pada lingkungan, sosial dan budaya saat ini lebih menarik hati konsumen dibanding dengan wisata buatan. Produk ekowisata dalam pasar wisata secara umum saat ini dapat dilihat pada bagan berikut:

Indonesia memiliki 5 (lima) prinsip pengembangan ekowisata merujuk pada (Mahadayani, 2009) yaitu pertama prinsip pelestarian merupakan kegiatan ekowisata tidak menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan dan budaya setempat baik masyarakat maupun wisatawan. Kedua prinsip pendidikan, dilakukan untuk memberikan informasi dan pembelajaran baru terkait budaya, adat istiadat, atau hal lainnya sebagai pengetahuan baru. Ketiga prinsip pariwisata, aktivitas yang mengandung unsur kesenangan/rekreasi. Keempat prinsip ekonomi, membuka peluang ekonomi bagi masyarakat terlebih jika tempat wisata yang dilakukan menggunakan sumber daya lokal seperti transportasi, akomodasi dan jasa pemandu, keuntungan sepenuhnya untuk masyarakat. Terakhir kelima prinsip partisipasi masyarakat setempat yaitu memberikan manfaat secara langsung/tidak langsung bagi masyarakat.

2. Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial menurut (Adi, 2013) merupakan sistem yang telah terorganisir dari institusi dan pelayanan sosial yang dibuat dan dimaksudkan untuk membantu individu atau kelompok untuk mencapai taraf standar hidup dan kesehatan yang lebih baik. Terdapat usaha yang terorganisir serta memiliki tujuan utama dalam hal ini meningkatkan taraf hidup masyarakat yang berlandaskan atas konteks sosial. Kesejahteraan sosial menyangkut pada aspek pelayanan serta kebijakan yang secara langsung terkait dari kehidupan masyarakat. Kesejahteraan sosial menyangkut pada jaminan sosial, perumahan, pendidikan, rekreasi, budaya dan lain-lain.

Kesejahteraan sosial merujuk pada pendapat (Adi, 2013) dapat dikategorikan sebagai suatu gerakan. Gerakan kesejahteraan sosial menyangkut pada peningkatan taraf hidup harus di perhatikan oleh dunia luas bukan hanya secara parsial yang artinya dilihat dari satu sisi. Gerakan kesejahteraan sosial memunculkan organisas-organisasi untuk mencapai taraf hidup masyarakat lebih baik lagi contohnya seperti organisasi lokal regional maupun internasional yang berusaha menangani masalah-masalah kesejahteraan sosial.

Kesejahteraan sosial merujuk pada pendapat (Nasikun, 2012) merumuskan setidaknya terdapat empat indikator kesejahteraan yaitu rasa aman (*Security*) Individu atau kelompok dapat dikatakan memiliki rasa tenang dalam diri. Kedua, kesejahteraan (*welfare*), Individu atau kelompok dalam hal ini tercukupinya kebutuhan fisik maupun pskis atau terpenuhinya kebutuhan primer. Ketiga, Kebebasan (*freedom*), individu atau kelompok akan merasa sejahtera ketika diberikan kebebasan untuk berekspresi. Terakhir Jati Diri (*identity*) individu atau kelompok dalam hal ini merasakan adanya pengakuan dari orang lain.

3. Ekologi Politik

Ekologi Politik muncul akibat adanya sebuah pandangan bahwa aspek-aspek lingkungan menjadi bagian penting bagi kehidupan manusia untuk tetap bertahan hidup serta adanya kerusakan lingkungan yang terjadi sehingga terkadang memberi dampak buruk bagi kehidupan sosial. Merujuk pada pendapat (Connely, 2003) menjelaskan bahwa ekologi politik atau *green politics* bersandar atas dua pilar utama yaitu setiap individu atau kelompok memberikan pengakuan bahwa sumber daya alam saat ini terbatas untuk menunjang kesejahteraan. kedua terdapat

dimensi etika yang masuk ke dalam ranah hubungan manusia dengan makhluk hidup lainnya. Kedua hal ini lah yang kemudian mengkaji kembali kebijakan dan praktek politik, sosial dan ekonomi memiliki hubungan antara alam dan manusia.

(Connely, 2003) menjelaskan pengelolaan ekologi politik yang berbasis lingkungan dan pemberdayaan harus mampu menimbulkan adanya kemandirian masyarakat. Ekologi politik merangsang individu atau kelompok untuk berpikir lebih kedepan serta memiliki tanggung jawab moral dalam memanfaatkan lingkungan sehingga berkelanjutan dan mampu memberdayakan lingkungan. Pemerintah sebagai organisasi formal dalam kajian ekologi politik dituntut untuk menetapkan kebijakan lingkungan yang dapat diimplementasikan secara efektif sehingga dapat mengatasi permasalahan lingkungan serta meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode diskriptif kualitatif untuk mengeksplor dan memahami pemaknaan dalam kehidupan sosial (Cresswell, 2009). Data primer dalam artikel ini diambil dari berbagai sumber diantaranya dokumen-dokumen terkait ekowisata, jurnal terkait

pembahasan pariwisata dan ekowisata bahari, media massa yang memberitakan terkait ekowisata dan pariwisata serta dari internet.

Pembahasan

Kawasan pesisir merupakan surga dunia yang memiliki pesona baik dari pesona keindahan alam yang dimiliki, sebagai sarana penguatan ketahanan pangan masyarakat nelayan, sebagai pintu gerbang utama dalam kegiatan perekonomian maupun pembangunan serta banyak hal lain. Atas dasar pemikiran tersebut pemerintah sebagai *stakeholders* utama harus memiliki perhatian penuh untuk mempertahankan keistimewaan pesisir. Hal tersebut didukung oleh konstitusi negara Indonesia Pasal 33 yang harus dijalankan sumber daya alam dipergunakan seutuhnya untuk kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah sebagai *stakeholders* utama harus menghendaki adanya kerjasama antar *stakeholders* seperti masyarakat, pemerintah pusat dan daerah, serta lembaga swadaya masyarakat untuk mewujudkan pembangunan wilayah pesisir. Pembangunan pesisir diperlukan karena memiliki keunikan wilayah serta beragamnya sumberdaya untuk kepentingan masyarakat sekitar. Setidaknya terdapat empat alasan kawasan pesisir harus dikelola yaitu *pertama*, secara

empirik terdapat ikatan ekologis yang harus terjaga atas dasar kepentingan nelayan. *Kedua*, sumberdaya yang dimiliki sangat penting untuk dikembangkan sebagai kepentingan pembangunan yang mengacu pada masyarakat. *Ketiga*, beragamnya keterampilan serta keahlian masyarakat seperti nelayan, petani sawah, petani tambak, petani rumput laut, pendamping pariwisata, kerajinan rumah tangga dll. *Keempat*, terdapat keuntungan baik secara ekologis maupun ekonomis untuk memanfaatkan kawasan pesisir demi kepentingan masyarakat.

Pemanfaatan pesisir sebagai sarana pemberdayaan masyarakat sesuai dengan program Nawacita pemerintahan Jokowi pada point tiga, enam dan tujuh dapat diwujudkan dengan memanfaatkan pesisir sebagai daerah Ekowisata Bahari. Merujuk pada buku (WWF-Indonesia, 2009) menjelaskan bahwa ekowisata merupakan perjalanan oleh seseorang turis ke daerah terpencil dengan tujuan menikmati dan mempelajari mengenai alam, sejarah dan budaya di suatu daerah, pola wisatanya bertujuan untuk membantuk ekonomi masyarakat loka dan mendukung pelestarian alam. Secara garis besar ekowisata bahari memiliki pemaknaan pariwisata di wilayah pesisir yang menjaga ekosistem pesisir untuk dimanfaatkan sebagai sarana pengelolaan

oleh masyarakat untuk perekonomian masyarakat lokal di wilayah pesisir.

1. Dampak Investor Pariwisata dalam Pengelolaan Industrialisasi Pariwisata

Pariwisata menjadi sarana dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui terpenuhinya akses lapangan pekerjaan, akan tetapi pariwisata yang di kelola oleh investor mengakibatkan hal sebaliknya. Berikut beberapa penelitian yang menyatakan buruknya pengelolaan pariwisata oleh investor antara lain:

a. Konflik antara Pengembang Pariwisata dan Masyarakat

Bali merupakan daerah di Indonesia yang terkenal akan pariwisatanya. Pariwisata di Bali menjadi hal penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang digunakan untuk kesejahteraan masyarakatnya. Pariwisata di Bali meningkatkan jumlah lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal. Pariwisata di Bali tidak henti-hentinya menerima wisatawan baik dari lokal maupun Internasional.

Salah satu daerah di Bali yaitu Badung, pada tahun 2000 tercatat didatangi wisatawan berjumlah 803.826 wisatawan dan pada tahun 2010 meningkat hingga 2.481.592 wisatawan. Peningkatan wisatawan di Kabupaten Badung tidak hanya berdampak positif, akan tetapi

berdampak negatif pula. Peningkatan wisatawan memaksa pengembang pariwisata untuk membangun infrastruktur untuk mengakomodir wisatawan yang datang, hal tersebut mengakibatkan kekurangan air yang dirasakan oleh masyarakat lokal.

Penelitian Hikmah Trisnawati pada tahun 2011 menekankan terjadinya konflik yang diakibatkan karena adanya perkembangan infrastruktur pariwisata yang mengakibatkan perebutan air di Kabupaten Badung dan Tabanan Bali. Trisnawati menjelaskan bahwa perkembangan infrastruktur pariwisata mengakibatkan pengurangan air karena adanya hotel baru, restoran baru, yang mengakibatkan berkurangnya lahan subak. Berkurangnya subak mengakibatkan penurunan kuantitas dan kualitas air bersih untuk dikonsumsi. Penurunan kuantitas dan kualitas air memaksa masyarakat masuk dalam pusaran konflik antara petani dengan petani, petani dengan investor dan petani dengan pemerintah yaitu PDAM (Trisnawati, 2012).

b. Perubahan Sosial Budaya Masyarakat dan Alam

Pariwisata dapat mengubah sosial budaya masyarakat lokal dan perusakan alam pada suatu daerah. Industrialisasi Pariwisata akan membentuk mekanisme pasar dalam menjalankan pariwisatanya

yang kemudian mengorbankan masyarakat lokal. Masyarakat lokal akan terpinggirkan kepentingannya dalam menjaga kebudayaan serta alamnya sendiri. Kepentingan wisatawan lebih diutamakan ketika suatu daerah ditetapkan sebagai daerah pariwisata belum lagi ketika adanya penyelenggara pariwisata seperti biro perjalanan wisata, agen perjalanan dan lain sebagainya. Muhammad Nurdin menjelaskan dalam artikelnya terkait dampak negatif Industri pariwisata pada lingkungan sosial budaya dan alam (Nurdin, 2012).

Nurdin menjelaskan pengembangan fisik dalam ranah pariwisata memicu ketegangan sosial dari masyarakat lokal. Indikator ketegangan yang dimaksud antara lain konflik penggunaan sumberdaya alam, Degradasi Lingkungan, dan kemunduran budaya. Konflik sumberdaya alam seperti perebutan air yang sebelum adanya pariwisata milik umum dan ketika ada pariwisata hanya digunakan parsial oleh masyarakat. Degradasi lingkungan ditandai alih fungsi lahan pertanian menjadi pembangunan hotel, resort dll untuk kepentingan wisatawan. Kemunduran budaya ditandai dengan adanya komersialisasi tempat bersejarah yang kemudian terjadinya tindakan vandalisme, pengotoran, pencurian dan kegiatan ilegal lainnya di tempat bersejarah dan sakral.

c. Relasi Kekuasaan di Balik Pengelolaan Industri Pariwisata

Michel Foucault menjelaskan bahwa terdapat hubungan antara ungkapan wacana, pengetahuan yang melandasinya dan terdapat relasi kekuasaan yang kuat dibaliknya. Wacana yang menguat perlu di garis bawahi bahwa akan selalu terdapat relasi kekuasaan yang tersembunyi dibaliknya. Foucault menjelaskan bahwa kekuasaan yang dimaksud yaitu plural bukan sentralistik. Foucault tidak melihat kekuasaan dari mekanisme kuasa berjalan, tidak melihat strategi kuasa, struktur politis, tuan dan hamba, pemerintah dan kelas sosial dominan lainnya melainkan melihat pada sisi bagaimana praktik kekuasaan dijalani, kekuasaan dapat diterima dan sebagai landasan kebenaran. (Foucault, 1980)

I Nyoman Wijaya dalam Artikelnya menjelaskan bahwa terdapat relasi kekuasaan di balik Industri Pariwisata di Bali. Terdapat dua kekuatan dalam perdebatan pariwisata di Bali. Pertama, kaum intelektual organik posesif di Bali beranggapan bahwa agama Hindu didasarkan pada nilai filosofis. Kedua, kaum intelektual konservatif yang menganggap bahwa agama Hindu didasarkan oleh tradisi. Kekalahan Kaum intelektual organik posesif di Bali mengakibatkan pesatnya pariwisata di Bali

yang lebih mementingkan pada nilai budaya dibandingkan pada nilai filosofisnya. Kemenangan kaum intelektual konservatif akibat adanya dukungan dari akademisi pada zamannya.

Perdebatan agama hindu merupakan filosofis ataupun tradisi mendatangkan berbagai kepentingan, terutama ekonomis sehingga menimbulkan penindasan dan menciptakan terobosan baru. Kegiatan upacara agama Hindu hanya dipandang sebagai pemenuhan kebutuhan wisatawan yang datang ke bali dibandingkan melihat pada sisi filosofis agama Hindu. Selain itu, pariwisata yang berdasarkan atas menciptakan peluang yaitu mendatangkan turis asing yang kemudian kebutuhan industri pariwisata pada kepuasan pelanggan menimbulkan lapangan pekerjaan yang luas.

2. Analisis Dampak Ekowisata Bahari dalam Perspektif Kesejahteraan Masyarakat dan Kelestarian Lingkungan Pesisir

Pariwisata merupakan kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang ke tempat tertentu yang tujuannya bukan untuk menetap atau untuk mencari nafkah, akan tetapi untuk bersenang-senang, memenuhi rasa ingin tahu suatu daerah, menghabiskan waktu senggang atau libur. Subjek pariwisata merupakan seseorang yang melakukan kunjungan ke suatu

tempat untuk berlibur yang disebut dengan wisatawan. Objek pariwisata merupakan tempat yang akan dikunjungi yang memiliki tempat untuk rekreasi, keindahan alam dan sebagainya.

Wisatawan ketika berkunjung dan melakukan kegiatan membutuhkan berbagai kebutuhan dan pelayanan seperti konsumsi, tempat tinggal dan perjalanan. Wisatawan ketika mengunjungi tempat pariwisata memiliki berbagai macam alasan untuk mendapatkan kepuasan jasmani dan rohani. Tujuan dari kegiatan pariwisata yang dilakukan wisatawan dapat berupa mendapatkan pengalaman baru seperti keseharian penduduk setempat, menikmati keindahan alam, menyaksikan kebudayaan yang unik atau mempelajari sejarah daerah tersebut.

Kegiatan pariwisata pada umumnya melibatkan stakeholders dalam menyediakan sarana prasarana seperti Pengusaha, pemerintah, dan Masyarakat. Pengusaha sebagai pengembang tempat wisata memberikan modal untuk mengembangkan daerah wisatanya agar terlihat menarik sehingga merubah suatu tempat menjadi lebih menarik untuk dikunjungi. Pemerintah sebagai stakeholders inti sebagai pemberi izin untuk mengembangkan tempat wisata agar tidak terjadi pelanggaran. Sedangkan masyarakat, sebagai representasi aktor

yang bersinggungan langsung dengan wisatawan yang berkunjung.

Konsep pariwisata yang berkembang saat ini mengarah pada pelestarian lingkungan. Bukan lagi pihak swasta atau pengusaha yang berurusan dalam kegiatan pariwisata akan tetapi saat ini sedang berkembang kegiatan pariwisata yang memperhatikan lingkungan alam sekitar serta memperhatikan kesejahteraan masyarakat sekitar. Pariwisata yang saat ini sedang populer dalam kajian pelestarian lingkungan yaitu Ekowisata.

Ekowisata mulai dikenalkan oleh Hector Ceballos-Lascurain sebagai alternatif dalam kelestarian lingkungan serta kesejahteraan masyarakat. Ekowisata merupakan perjalanan ke tempat-tempat yang masih alami dan relatif belum terganggu atau tercemari dengan tujuan untuk mempelajari, mengagumi dan menikmati pemandangan flora dan fauna serta bentuk-bentuk manifestasi budaya masyarakat yang ada, baik dari masa lampau maupun masa kini.

Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di Dunia dengan jumlah pulau mencapai 17.499 pulau serta memiliki luas total wilayah mencapai 7,81 juta km². Total luas daratan yang dimiliki Indonesia mencapai 2,01 juta km², total lautan 3,52 juta km² serta 2,55 juta km² merupakan zona ekonomi eksklusif (ZEE). Data

tersebut menunjukkan bahwa lautan di Indonesia lebih luas ketimbang daratan. Ekosistem lautan yang begitu variatif menjadi keunggulan bagi tersendiri bagi Indonesia dibidang baharinya. (KKP.go.id, 2017)

Lautan yang dimiliki Indonesia pun tidak lepas dari keistimewaan bahari yang dimiliki di dalamnya serta memiliki kualitas terbaik. Indonesia memiliki kepulauan-kepulauan yang menawan dari sisi terumbu karang, tumbuhan laut, serta kehidupan lain yang menunjang data tersebut. Luas terumbu karang yang dimiliki mencapai 50.875 km² dan menyumbang hingga 18% luas total terumbu karang di dunia serta memiliki 65% luas total coral triangle, terumbu karang ini terdapat di daerah timur Indonesia. Selain terumbu karang, lautan Indonesia memiliki ekosistem hewan laut yang cukup variatif seperti Ikan, udang dan berbagai jenis hewan laut lainnya (KKP.go.id, 2017). Hal tersebut membuktikan bahwa Indonesia memiliki kekayaan di bidang baharinya untuk membentuk pariwisata yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Berikut berbagai hasil penelitian yang menyebutkan potensi pariwisata dalam bentuk ekowisata yang dilakukan sebagai berikut:

a. **Potensi Ekowisata Bahari di Daerah Perlindungan Laut Desa Bahoi**

Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara.

Penelitian jurnal ini dilakukan oleh Cidy S. Walan Douw, Jardie A. Andaki, dan Olivie V Kotambunan pada tahun 2016 diterbitkan pada jurnal Akulturasi Volume 4 No. 1. Penelitian ini menggali mengenai potensi sumberdaya dan ekosistem wilayah pesisir yang harus dikembangkan untuk kesejahteraan rakyat dan upaya menjaga sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dari kerusakan. Merujuk pada penelitian ini, untuk menjaga pesisir dari kerusakan perlu dibentuknya Daerah Perlindungan Laut (DPL) yang mengacu pada perlindungan habitat di daerah pesisir.

Penelitian jurnal ini dilakukan di wilayah pesisir desa Bahoi kecamatan Likupang kabupaten Minahasa Utara. Sumber daya alam seperti mangrove yang dimiliki oleh desa Bahoi dinilai masih tergolong baik dari sisi kondisi ekosistemnya. Baiknya ekosistem mangrove yang ada di desa Bahoi dikarenakan pada tahun 1999 desa Bahoi termasuk desa yang ditetapkan sebagai Daerah Perlindungan Laut (DPL). Desa Bahoi menjadi salah satu desa yang menjadi acuan bagi desa lain melihat pengelolaan potensi yang ada dengan sangat baik.

Penjagaan DPL dilakukan dengan pembuatan peraturan desa yang

ditetapkan pada tahun 2003 dengan menetapkan DPL seluas 10 hektar. Penetapan Perdes di desa Bahoi dilatarbelkangi dengan adanya dana dari Program Nasional Pemberdayaan masyarakat lingkungan mandiri pedesaan (PNPM LMP). Perdes yang ditetapkan menyangkut daerah perlindungan laut yang terbagi dalam zona inti dan zona penyangga. Zona inti menetapkan bahwa kegiatan penangkapan ikan dan aktivitas pengambilan sumber daya laut tidak diperbolehkan seperti pelepasan jangkar, merusak terumbu karang dan penggunaan galah tidak diperbolehkan. Zona penyangga dimaksudkan pada zona yang dikelilingi oleh zona inti, kegiatan yang diperbolehkan untuk penangkapan ikan diperbolehkan dengan menggunakan alat-alat tradisional. Atas dasar perdes tersebut mengajarkan masyarakat untuk menjaga lingkungannya serta masyarakat mampu meningkatkan produksi perikanan dan desa Bahoi mendapatkan penghargaan “Adi Bakti Mina Bahari”.

Terjaganya pelestarian pesisir desa Bahoi mendorong masyarakat untuk lebih kreatif dalam hal pendapatan sehingga mereka membangun daerah ekowisata sebagai tujuan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan ekowisata di desa Bahoi dibentuk dan dilakukan pada tahun 2010 dengan basis pada masyarakat desa dan tidak melibatkan pihak swasta. Desa

bahoi menawarkan keindahan dari sisi mangrove dibagian pesisir dan menawarkan keindahan alam bawah laut seperti keberagaman hewan serta hayati di dalam lautnya. Ekowisata menjadi bagian penting selain dari kegiatan nelayan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. (Walandouw, 2016)

b. Potensi Pemanfaatan Ekosistem Pesisir Pantai Labuhan Haji Lombok Timur Sebagai Daerah Ekowisata.

Penelitian ini dilakukan oleh Deni Apriana S. Dan Daindo Milla pada tahun 2017, diterbitkan pada Jurnal Biologi Tropis Volume 17 Nomor 1. Penelitian ini menjelaskan bahwa ekosistem pesisir memiliki keunikan tersendiri yang terdiri dari terumbu karang, hutan bakau, pantai dan pasir, estuari, lamun yang menjadi pelindung dari adanya erosi, banjir dan berperan untuk mengurangi dampak polusi dari daratan hingga laut. Ekosistem menjadi kajian yang menyangkut pada empat kategori yaitu pertama sebagai penyediaan bahan seperti pangan, air kayu dan hasil lainnya. Kedua sebagai pengontrol iklim, banjir serta penyakit. Ketiga peluang untuk keperluan rekreasi, estetik dan spiritual. Keempat menjadi pemeliharaan prose yang menjadi landasan bagi layanan jasa

lainnya seperti polinasi dan siklus nutrient.

Ekosistem yang terdapat di pantai Labuhan Haji kabupaten Lombok Timur tidak dipungkiri lagi memiliki potensi untuk dijadikan wisata. Pemerintah selaku pengelola mengembangkan pantai labuhan haji sebagai salah satu daerah wisata yang ada di Lombok timur. Daerah labuhan haji memiliki keindahan pantai yang menarik, memiliki bentang alam yang indah, memiliki taman dan pepohonan yang rindang serta memiliki pemandangan persawahan yang masih alami.

Penelitian ini mengungkap bahwa kegiatan pariwisata yang dikembangkan oleh pemerintah tidak dijaga dari pelestarian lingkungannya. Tidak terjaganya lingkungan salah satunya menempatkan lokasi pedagang secara acak, hal tersebut menyebabkan para pelancong ketika menikmati pariwisata tidak merasa nyaman. Selain itu, para wisatawan tidak memperhatikan lingkungannya seperti membuang sampah tidak pada tempatnya. Munculnya permasalahan tersebut akibat pengelolaan yang kurang baik bagi para pemangku kepentingan sehingga penataan tidak dilakukan secara baik, serta tidak adanya sosialisasi akan peduli kebersihan ditempat wisata tidak dijelaskan pada masyarakat luar.

Penelitian ini menganjurkan bahwa perlu adanya pariwisata yang berbasis pada masyarakat dan mengacu pada kelestarian lingkungan berupa ekowisata. Pengembangan ekowisata perlu adanya penentuan daya dukung lingkungan yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan berbasis potensi seperti kapasitas bioekologi. Selain bioekologi, pendekatan untuk ekowisata dapat menggunakan metode/pendekatan yang berbasis pada jasa ekosistem seperti yang dikembangkan Millenium Ecosystem Assesment (MEA) pada tahun 2005. Pendekatan MEA dilakukan berdasarkan atas konteks “manfaat yang diperoleh masyarakat dari ekosistem” (Apriana, 2017).

c. Kajian Potensi Ekowisata Bahari Kenagarian Mandeh Kecamatan Koto XI Terusan Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat.

Penelitian ini dilakukan oleh Wildan Rayadi pada tahun 2006 dan diterbitkan pada jurna Green Growth dan Manajemen Lingkungan. Penelitian ini menjelaskan konsep ekowisata sebagai pengembangan pariwisata yang berkelanjutan dan bertujuan untuk mendukung upaya pelestarian lingkungan, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sehingga memberikan manfaat ekonomi kepada

masyarakat setempat. Dari segi pengelolaan ekowisata dapat dijelaskan merujuk pada pendapatan ekonomi untuk memanfaatkan daerah-daerah yang alami dan dibuat berdasarkan atas dasar alam dan secara berkelanjutan yang mendukung pelestarian lingkungan.

Penelitian ini menunjukkan bahwa pantai Tangsi dapat dijadikan daerah ekowisata. Pantai tangsi berdasarkan atas pengukuran parameter memiliki presentase 84,61% dalam kategori wisata rekreasi. Kawasan pantai tangsi memiliki daya dukung sekitar 300 orang/hari sedangkan wisatawan yang datang berkisar 50-150 orang/perhari sehingga pantai ini dapat disimpulkan mampu menampung seluruh kegiatan wisata yang dilakukan pengunjung tanpa melebihi daya dukung kawasan hal tersebut membuktikan pantainya dapat tetap terjaga kelestariannya.

Penelitian ini mengukur potensi ekowisata di pantai Tangsi dengan menggunakan metode SWOT. Kelebihan yang dimiliki pantai tangsi yaitu potensi yang besar mampu menarik wisatawan terlihat dari jumlah kunjungan, sarana dan prasarana penunjang kegiatan wisata cukup baik, dapat diterapkan manajemen lingkungan untuk kelestarian lingkungan. Kelemahan yang dimiliki pantai Tangsi yaitu masyarakat belum mengetahui secara utuh konsep ekowisata, akses

untuk mencapai pantai tangsi hanya melalui transportasi laut sehingga wisatawan harus menggunakan perahu untuk dapat menuju lokasi. Peluang yang dimiliki Pantai Tangsi yaitu tingkat kunjungan wisatawan dapat dikatakan sangat tinggi, adanya promosi yang dilakukan di pantai Tangsi melalui media sosial. Ancaman yang dimiliki pantai Tangsi yaitu adanya persaingan dengan objek wisata lain, terdapat ancaman bencana alam yang dapat merusak lingkungan pantai serta tingginya angka wisatawan menyebabkan kurangnya kebersihan pantai tangsi (Rayadi, 2016).

d. Analisis Potensi dan Kondisi Ekosistem Terumbu Karang Pulau Menjangan Untuk Pengembangan Ekowisata Bahari Berbasis Pendidikan Terpadu.

Penelitian ini dilakukan oleh Gede Ari Yudasmara pada tahun 2013, penelitian ini dijelaskan pada Seminar Nasional FMIPA UNDIKSHA III. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis potensi dan kondisi pulau menjangan, menganalisis kesesuaian pemanfaatan ekowisata, dan menganalisis daya dukung ekologi untuk ekowisata bahari. Penelitian ini menjelaskan potensi alam bawah laut di perairan pulau menjangan dengan data kuantitatif berdasarkan atas

data kondisi ekosistem, dan data kondisi kualitas perairan pulau menjangan.

Penelitian ini menjelaskan bahwa kondisi lingkungan yang ada di pulau menjangan dapat dikatakan sedang berdasarkan atas enam stasiun yang diteliti. Stasiun satu menjelaskan bahwa Terumbu karang yang ada di pulau menjangan dapat dikatakan pada kondisi sedang yaitu sebesar 31,70. Stasiun dua menjelaskan bahwa kondisinya masuk kategori sedang dengan nilai 49,23. Stasiun tiga menjelaskan bahwa terumbu karangnya pada kategori sedang yaitu 48,67. Stasiun empat terumbu karang yang dimiliki masuk kategori baik yaitu 52,48%. Stasiun lima kategori karang tergolong sedang yaitu 45,47%. Stasiun enam memiliki kondisi karang sedang yaitu sebesar 51% dan memiliki biota laut yang beraneka ragam.

Hasil penelitian yang didapat dalam penelitian ini cukup memungkinkan bahwa pulau menjangan dapat dijadikan tempat ekowisata. Kondisi dan potensi lingkungan yang dimiliki oleh pulau menjangan tergolong baik sehingga mampu dijadikan tempat ekowisata. Selain itu tingkat indeks nilai kesuaian yang telah dilakukan dapat menjelaskan bahwa kawasan pulau menjangan dapat dijadikan tempat untuk aktivitas wisata bahari di pesisir kabupaten Buleleng dengan kategori sesuai dan memiliki

daya dukung yang sangat tinggi yaitu 28 orang per har untuk *diving* dan 24 orang untuk *Snorkeling*. Berdasarkan atas data tersebut maka dengan adanya ekowisata akan menimbulkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan serta menjaga kelestarian lingkungan. (Yudasmara, 2013)

Kesimpulan

Pariwisata pada hakikatnya akan memberikan peluang kepada masyarakat untuk menuju pada kesejahteraan. Pariwisata akan memicu kedatangan wisatawan untuk berkunjung ke suatu negara dan negara tersebut dapat dikenal luas. Permintaan wisatawan dalam kegiatan pemenuhan kebutuhan rohani dan jasmaninya akan mendatangkan lapangan pekerjaan yang luas bagi masyarakat sekitar sehingga akan dapat memberikan nilai ekonomis yang cukup baik bagi masyarakat.

Industri Pariwisata yang berkembang saat ini akan menggerus nilai budaya, nilai keaslian, serta akan menimbulkan apa yang disebut oleh Foucault sebagai Power and Knowledge. Pariwisata yang dikelola oleh industrial pariwisata akan menimbulkan dampak kepentingan yang luas sehingga nantinya hanya akan menimbulkan ketimpangan kelas bagi pemilik industri pariwisata dan masyarakat sekitar. Pengembangan industri pariwisata

juga dapat merusak nilai historis pada suatu wilayah yang mengakibatkan menggerus nilai budaya, merusak lingkungan yang tergeser akibat kepentingan ekonomi bagi para pemilik industri pariwisata. Masyarakat tidak sepenuhnya akan merasakan keuntungan dari pariwisata karena semua hanya akan dirasakan oleh segelintir pemilik industri pariwisata saja.

Konsep ekowisata akan memberikan dampak baik bagi kelestarian lingkungan serta masyarakat. Ekowisata dibangun atas dasar kepentingan masyarakat sekitar. Pengelolaan pariwisata yang berbasis pada ekowisata selalu menitik beratkan pada pengalaman wisatawan yang datang untuk bisa mengenal budaya masyarakat, kelestarian keindahan alam yang terjaga serta akan menitik beratkan pada kepentingan masyarakat untuk ikut serta secara langsung dalam pengelolaan pariwisata. Hal tersebut didasarkan pada kelembagaan ekowisata hanya akan dikelola oleh masyarakat bersama organisasi non pemerintah untuk mengelola pariwisata atas dasar izin yang diberikan oleh pemerintah.

Potensi bahari Indonesia yang memiliki keidahan alam yang luas memberikan peluang untuk memberikan kesempatan pengembangan ekowisata. Potensi-potensi ekowisata yang ada di Indonesia patut untuk diberikan tempat

sebagai pemenuhan kebutuhan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar. Sebut saja seperti dijelaskan di muka, potensi ekowisata untuk dikembangkan terletak di daerah Lombok timur, minahasa dan sumatera barat. Pengembangan ekowisata tidak terlepas dari peran kelembagaan pemerintah daerah dalam mendukung gerakan ekowisata di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, I. R. (2013). *Kesejahteraan Sosial (Pekerjaan Sosial, Pembangunan. Sosial, dan kajianPembangunan)*. Depok: Rajawali Press.
- Afioma, G. (2016, Juli 04). *Ironi Pembangunan Pariwisata di Taman Nasional Komodo*. Dipetik Juli 18, 2018, dari <https://indoprogress.com/2016/07/ironi-pembangunan-pariwisata-di-taman-nasional-komodo/>
- Antaraneews. (2015, Maret 27). *Garis Pantai Indonesia terpanjang Kedua di Dunia*. Dipetik Juli 18, 2018, dari <https://www.antaraneews.com/berita/487732/garis-pantai-indonesia-terpanjang-kedua-di-dunia>

- Apriana, D. d. (2017). Potensi Pemanfaatan Ekosistem Pesisir Pantai Labuhan Haji Lombok Timur Sebagai Daerah Ekowisata. *Jurnal Biologi Tropis Volume 17 Nomor 1*.
- Connely, J. a. (2003). *Politics and the Environment- From Theory to Practice*. London: Routledge.
- Cresswell, J. W. (2009). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. California: SAGE Publications.
- Dale, C. J. (2013). *Kuasa, Pembangunan dan Pemiskinan Sistemik, Analisis Kontra-Hegemoni dengan Fokus Studi Kasus di Manggarai Raya, NTT, Indonesia*. Labuan Bajo: Sunspirit Boks.
- Foucault, M. (1980). *Power/Knowledge*. Sussex: The Harvester Press.
- KKP.go.id. (2017, September 01). *Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia*. Dipetik Agustus 02, 2018, dari Maritim Indonesia, Kemewahan yang Luar Biasa: <http://kkp.go.id/artikel/2233-maritim-indonesia-kemewahan-yang-luar-biasa>
- Mahadayani, W. (2009). *Ekowisata: Panduan Dasar Pelaksanaan*. Jakarta: Unesco Office.
- Nasikun. (2012). *Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta: Rajawali PRes.
- Nurdin, M. (2012). *nurdinrazak.com*. Dipetik 09 17, 2018, dari [nurdinrazak.com](http://www.nurdinrazak.com): <http://www.nurdinrazak.com/image/s/artikel-dampak-pariwisata.pdf>
- Presidenri.go.id. (2015, November 13). *Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia*. Dipetik Juli 17, 2018, dari <http://presidenri.go.id/berita-aktual/indonesia-sebagai-poros-maritim-dunia.html>
- Rayadi, W. (2016). Kajian Potensi Untuk Ekowista di Pantai Tangsi Kabupaten Lombok Timur Nusa Tenggara Barat dengan Menggunakan SWOT Analisis. *Jurnal Gren Growth dan Manajemen Lingkungan Volume 5 Nomor 2*.
- Santi, N. M. (2017). Kontribusi Wisata Bahari Terhadap Kesejahteraan

- Masyarakat Pesisir Pulau Nusa Penida, Klungkung. *Jurnal Kajian Bali Vol.07 No.02*.
- Suardana, I. W. (2015). Dampak Pariwisata Terhadap Mata Pencaharian Masyarakat Pesisir Karangasem: Pendekatan Pro Poor Tourism. *Jurnal Piramida Vol. IX No 2*.
- Tempo. (2011, Juni 06). *Pembangunan Pariwisata Ditengarai Rusak Lingkungan Bali*. Dipetik Juli 18, 2018, dari <https://nasional.tempo.co/read/338797/pembangunan-pariwisata-ditengarai-rusak-lingkungan-bali>
- Trisnawati, H. (2012). Dampak Perkembangan Infrastruktur Pariwisata terhadap konflik air di Kabupaten Badung dan Tabanan. *Volume 2 Nomor 1*.
- Walandouw, C. S. (2016). Potensi Ekowisata Bahari di Daerah Perlindungan Laut Desa Bahoi Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara. *Akulturas Volume 4 Nomor 1*.
- WWF-Indonesia, K. K. (2009). *Prinsip dan Kriteria Ekowisata Berbasis Masyarakat*. Jakarta: Direktorat Produk Wisata Direktorat Jenderal Pengembangan Dstinasi Pariwisata Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata dan WWF-Indonesia.
- Yudasmara, G. A. (2013). Analisis Potensi dan Kondisis Ekosistem Terumbu Karang Pulau Menjangan untuk Pengembangan Ekowisata Bahari Berbasis Pendidikan Terpadu. *Seminar Nasional FMIPA UNDIKSHA III* (hal. 171-177). Denpasar: UNDIKSHA.